



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**BANTUAN TRANSPORTASI LOKAL JEMA'AH HAJI
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan biaya transportasi Jema'ah haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Transportasi Lokal Jema'ah Haji Kabupaten Siak;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN TRANSPORTASI
LOKAL JEMA'AH HAJI KABUPATEN SIAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Jema'ah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Biaya Transportasi adalah biaya dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Bantuan Transportasi Lokal Jema'ah Haji adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai transportasi jema'ah haji dari Siak Sri Indrapura ke Pelabuhan Embarkasi dan dari Pelabuhan Debarkasi ke Siak Sri Indrapura.

9. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan Jema'ah haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan Jema'ah haji dari Arab Saudi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

Pasal 2

Bantuan transportasi lokal jema'ah haji dikelola dan/atau dibelanjakan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan transportasi lokal jema'ah haji diatur dan dialokasikan dengan tujuan:

- a. tersedianya pelayanan yang baik dan optimal bagi Jema'ah haji dalam proses pemberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke Kabupaten Siak;
- b. mengurangi beban biaya Jema'ah haji;
- c. menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat daerah;
- d. melancarkan pelaksanaan tugas Panitia Haji Daerah;

BAB II CAKUPAN DAN SUMBER BANTUAN

Pasal 4

Bantuan transportasi lokal jema'ah haji mencakup:

- a. biaya transportasi jema'ah haji dari Kota Siak Sri Indrapura ke Pelabuhan Embarkasi;
- b. biaya transportasi jema'ah haji dari Pelabuhan Debarkasi ke Kota Siak Sri Indrapura;
- c. biaya komponen pendukung lainnya.

Pasal 5

Komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- a. petugas pengamanan dan pengawalan di perjalanan;
- b. pangangkutan barang dan upah buruh di asrama haji, pelabuhan embarkasi dan pelabuhan debarkasi.

Pasal 6

- (1) Bantuan transportasi lokal Jema'ah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Besaran bantuan transportasi lokal Jema'ah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Bantuan transportasi lokal Jema'ah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Pengelola bantuan transportasi lokal Jema'ah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jema'ah Haji.

BAB IV
LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah dalam menjalankan tugas, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan Jema'ah haji dilarang untuk memungut biaya tambahan terkait dengan transportasi lokal Jema'ah haji.
- (2) Pencairan dan penggunaan bantuan transportasi lokal Jema'ah haji diawasi pelaksanaannya oleh lembaga pengawas fungsional daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK:7.81.C/2016

BAB III
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Bantuan transportasi lokal Jema'ah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Pengelola bantuan transportasi lokal Jema'ah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jema'ah Haji.

BAB IV
LARANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah dalam menjalankan tugas, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan Jema'ah haji dilarang untuk memungut biaya tambahan terkait dengan transportasi lokal Jema'ah haji.
- (2) Pencairan dan penggunaan bantuan transportasi lokal Jema'ah haji diawasi pelaksanaannya oleh lembaga pengawas fungsional daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK:7.81.C/2016

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN TRANSPORTASI LOKAL JEMA'AH CALON HAJI KABUPATEN SIAK

I. UMUM

Bahwa dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Kementerian Agama dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Kedudukan, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Disamping itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga membuka peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas nasional yang bersifat tahunan tersebut. Undang-Undang ini mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Agama, antara lain untuk membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut bertanggung jawab terhadap transportasi lokal ke dan dari embarkasi/debarkasi, yang pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak dapat membentuk Panitia Lokal dan menyediakan anggaran melalui hibah dari APBD Kabupaten untuk dapat menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh sarana dan prasarana serta kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik. Hal ini tentu saja dimaksudkan dalam rangka memenuhi hak jema'ah haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi akomodasi, konsumsi dan transportasi yang memadai.

Peraturan Daerah tentang Biaya Lokal Penyelenggaraan Ibadah Haji ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Panitia Haji Daerah, Sumber Pembiayaan, Koordinasi dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup. Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam 7 BAB, 11 Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4